



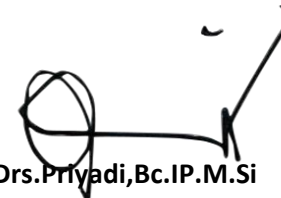


## PROSES PENGARSIPAN BERKAS PEMINDAHAN NARAPIDANA

No.	KEGIATAN	PELAKSANA	MUTU BAKU			KETERANGAN
		STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengklasifikasi Laporan Pelaksanaan Pemindahan Narapidana dari UPT		ATK dan Berkas	3 menit	SK Pemindahan Narapidana sudah diklasifikasi	
3	Mencatat Nomor tanggal Laporan Pelaksanan Pemindahan Narapidana, Nomor SK tanggal SK Persetujuan Pemindahan dan Tanggal Pelaksanaan Pemindahan Narapidana ke dalam buku arsip		ATK dan Berkas Pemindahan Narapidana	3 menit	Nomor Pemindahan Narapidana sudah tercatat	
2	Memasukkan Laporan Pelaksanan Pemindahan Narapidana,SK Persetujuan Pemindahan Narapidana dan pengantar usulan kedalam map yang sudah diberi label		ATK dan Berkas Pemindahan Narapidana	3 menit	Berkas Pemindahan Narapidana sudah masuk dalam map	
3	Menyimpan dan menata berkas Pemindahan Narapidana ke rak arsip		ATK, rak, dan Berkas Pemindahan Narapidana	5 menit	Berkas Pemindahan Narapidana sudah tertata	

Jumlah waktu : 11 menit

**KEPALA KANTOR WILAYAH**

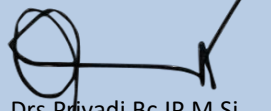


**Drs. Priyadi, Bc. IP. M. Si**  
**NIP.19630811 198703 1 001**



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

**KANTOR WILAYAH SULAWESI SELATAN**

Nomor SOP	
Tanggal Pembuatan	Juli 2018
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	<p>KEPALA KANTOR WILAYAH</p>  <p>Drs. Priyadi, Bc. IP. M. Si NIP.19630811 198703 1 001</p>
Nama SOP	PENGARSIPAN BERKAS PEMINDAHAN NARAPIDANA

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan;</li> <li>2. UU RI Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak;</li> <li>3. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;</li> <li>4. PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>5. PP Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan;</li> <li>6. PP Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah R.I Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tatib Rutan;</li> <li>8. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor:M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan;</li> <li>9. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.01-PK.02.01 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pemindahan Narapidana Anak dan Tahanan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SLTA</li> </ol>

Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
SOP PEMINDAHAN NARAPIDANA	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
.	Pengarsipan Pemindahan Narapidana

